



Tidak Keberatan karena Menyadari Bukan Miliknya

BEBERAPA hari lalu ramai di sosial media terkait surat dari Keraton Jogjakarta yang terbit 4 September 2023. Surat ditujukan bagi warga *ngindung* atau menempati tanah di sepanjang beteng (Margi

Hinggil) Keraton. Di dalamnya tertulis, warga yang menempati tanah di sisi luar beteng diminta untuk tidak lagi memperpanjang izin kekancingan atau izin menggunakan tanah Keraton ■ ▶ *Baca **Tidak...** Hal 7*

Tidak Keberatan karena Menyadari Bukan Miliknya

Sambungan dari hal 1

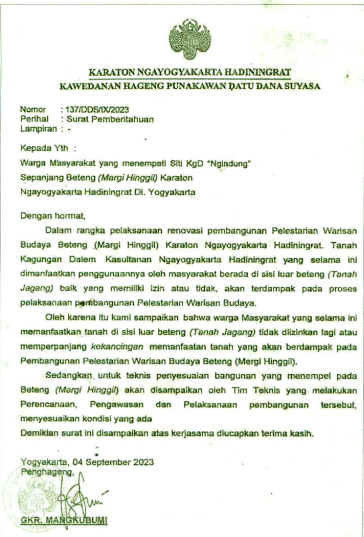
Sisi luar beteng yang dimaksud dulunya merupakan tanah jagang milik Keraton. Permintaan penghentian izin kekancingan ini merupakan upaya Keraton untuk merevitalisasi tanah jagang dan menghidupkan kembali fungsi aslinya. Surat pemberitahuan ini beredar luas dengan bubuhan tanda tangan GKR Mangkubumi.

Kawasan yang turut terkena dampak revitalisasi adalah sepanjang Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Ibu Ruswo. Keduanya masuk dalam wilayah Kelurahan Prawirodirjan. Saat dikonfirmasi *Radar Jogja*, Lurah Prawirodirjan Rusdi Haryanto mengaku belum menerima surat tembusan dari GKR Mangkubumi itu.

"Wilayah belum menerima. Kemantren (Gondomanan) juga belum. Kalau menerima, Pak Mantri langsung menginformasikan kepada kita," kata Rusdi saat ditemui di Kantor Kelurahan Prawirodirjan, kemarin (12/9).

Meski belum menerima surat pemberitahuan dari Keraton, Rusdi mengaku pihaknya bersama warga yang terkena dampak revitalisasi sudah diberi sosialisasi oleh Keraton. Sosialisasi dilakukan sekitar awal tahun 2023 lalu.

Menurut Rusdi, wilayah dalam hal ini Kelurahan Prawirodirjan tidak terlalu terlibat terlalu banyak dalam proses revitalisasi. Ini lantaran masyarakat sudah paham dan menyadari sebagian tanahnya merupakan tanah milik Keraton yang harus dikembalikan. Sehingga tak ada konflik



UNTUK PENGINDUNG: Surat yang ditandatangani GKR Mangkubumi terkait pembangunan pelestarian warisan budaya beteng Keraton.

sosial yang terjadi selama proses pra-revitalisasi. Dia mencatat setidaknya ada 38 bangunan di sepanjang Jalan Brigjen Katamso yang terdampak pembangunan revitalisasi beteng. "Artinya kalau itu ada gejolak warga berkaitan dengan revitalisasi beteng, wilayah dilibatkan karena itu menyangkut masalah dinamika sosial efek dari pembangunan itu. Tapi, ini kelihatannya adem-adem saja," jelasnya.

Ia menuturkan, tanah jagang memang tak seharusnya dibangun menjadi tempat hunian. Untuk itu, tanah warga yang menempel dengan beteng

diambil selebar 2-4 meter. Ini akan dikembalikan fungsinya sebagai tanah jagang. Menurut Rusdi, tanah jagang itu dulunya menjadi pertahanan. "Ukurannya itu kalau kuda meloncat, tidak sampai. Itu diperkirakan empat meter," tambahnya.

Salah seorang warga Jalan Brigjen Katamso yang terdampak pembangunan revitalisasi beteng adalah Sumartini. Dia mengaku sudah tinggal lama di lokasi tersebut bersama sang suami. Tempat tinggalnya kini juga menjadi tempat usaha jamu yang dia beri nama Jamu Cekok Krekop. Saat dikonfirmasi, Sumar-

Ukurannya itu kalau kuda meloncat, tidak sampai. Itu diperkirakan empat meter."

RUSDI HARYANTO
Lurah Prawirodirjan

tini mengaku tempat tinggalnya bagian belakang terkena dampak revitalisasi. Ukuran tanah yang terkena dampak selebar 2,5 meter. Ini lantaran tanah bagian belakang itu merupakan tanah magersari. Sementara legalitas tanah bagian depan merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luasan tanah total 97 meter persegi. "Saya dikasih tahu kalau ini (tanah) akan distuwun kalih Keraton," ucapnya.

Saat ditanya soal uang bebungah, Sumartini mengaku tak tahu secara pasti. Akan tetapi, yang jelas dia tidak keberatan jika tanah di belakang rumahnya itu harus turut terdampak revitalisasi. "Nggak, soalnya bukan tempat saya. Saya tidak keberatan," tegasnya.

Warga lainnya, Widadi juga mengaku terdampak di bagian belakang tempat tinggalnya. Dia mengatakan rata-rata warga yang terdampak mendapat bebungah sebesar Rp 140 juta.

"Kalau yang di belakang tembok Rp 140 juta, tapi kalau yang depan tidak ada. Memang (belakang, tanah jagang) tidak boleh dibangun. Tapi ada yang buat pawon, WC, jadi agak dimajukan. Sudah didata, ditanya rekeningnya berapa. Nanti sekitar bulan Maret, April (2024) turun. Diberi waktu empat bulan, setelah itu dibersihkan," ungkapnya. (isa/laz/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005